

PROYEK OGP BOJONEGORO: STUDI ANALISA PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN DALAM PROYEK *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP* DI KABUPATEN BOJONEGORO.

Galang Gerald¹, Sri Musrifah²

¹Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, galanggerald88@gmail.com

²Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, rifa_unirow@yahoo.co.id

Abstrak

Di tengah persoalan fundamental sosial ekonomi seperti kemiskinan, derajat pendidikan, patologi birokrasi dan konstelasi demokrasi transisi serta kondisi demografis yang mayoritas penduduk berada di wilayah pedesaan, pemerintahan Kang Yoto-Kang Hartono yang terpilih sejak pilkada 2008 melakukan reformasi manajemen pemerintahan yang berbasis keterbukaan dan partisipasi di Kabupaten Bojonegoro. Berawal dengan manajemen keterbukaan pemerintahan melalui Dialog Publik (*Sobo Pendopo*), keterbukaan data dan informasi (*open data*) dan keterbukaan pengaduan publik (*open opportunity for complain*) yang menstimulan partisipasi warga secara massif. Episodik, berkembang pada manajemen keterbukaan kolaborasi dengan berbagai aktor, yang di dalam konteks ini dikenal dengan sinergi 4 sekawan yaitu akademik, korporasi, komunitas dan pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan daerah. Konsistensi praktik manajemen pemerintahan terbuka selama 8 tahun tersebut, menempatkan Kabupaten Bojonegoro sebagai proyek percontohan pemerintahan lokal yang berbasis OGP (*Sub-national Government of Open Government Partnership 2016*) sejajar dengan kota-kota besar di berbagai belahan dunia lainnya, seperti Madrid, Paris, Seoul dan lain-lain. Fenomena di atas didedah oleh peneliti menggunakan metodologi kualitatif *-grounded theory*, melalui analisa paradigm manajemen pemerintahan *New Public Service* yang mengeksplorasi 4 dasar teori yaitu demokrasi kewargaan, model komunitas dan masyarakat sipil, humanism organisasi dan administrasi publik *postmodern*.

Kata Kunci : Manajemen Pemerintahan, Kabupaten Bojonegoro, *New Public Service*, *Open Government Partnership*.

I. PENDAHULUAN

Kang Yoto dan Kang Hartono, bupati-wakil terpilih pilkada Bojonegoro 2008 mengawali kebijakan politiknya dengan penerapan manajemen pemerintahan terbuka (*Open Government*) sampai saat ini. Keberanian dalam menerapkan model manajemen pemerintahan terbuka dengan berbasis deliberasi dengan warga, transparansi informasi dan data serta kanalisasi pengaduan publik secara sistematis di tengah persoalan sosial ekonomi yang kompleks serta proses demokratisasi lokal yang dalam tahapan transisi adalah sebuah terobosan paradigmatis manajemen pemerintahan.

Dialog publik menjadi lokomotif reformasi manajemen pemerintahan yang ber-raras pada aspek keterbukaan dan partisipasi. Di dalam episode selanjutnya, manajemen pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro melibatkan tiga stakeholder yaitu komunitas (*community*), pengusaha (*corporate*)

dan para ahli (*academy*) yang kemudian dikenal dengan istilah 4 sekawan dalam membangun Kabupaten Bojonegoro.

Konsistensi praktik manajemen pemerintahan terbuka selama 8 tahun menarik perhatian Organisation for Economic Cooperation of Development (OECD) yang sedang menyusun dampak pelaksanaan *open governance partnership* (OGP), baik di pemerintah pusat dan daerah, bersama-sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas RI. Atas dasar tersebut, pemerintahan Kabupaten Bojonegoro diundang untuk mengikuti pertemuan bersama beberapa pemerintah daerah lainnya.¹

Setelah melalui proses seleksi baik dari pihak eksternal maupun internal, pada tanggal 8 April 2016 menyatakan Kabupaten Bojonegoro terpilih sebagai pilot project OGP pemerintahan daerah yang mewakili Indonesia dari 15 pemerintahan daerah lainnya di dunia.²

¹ Pada tanggal 27 Oktober 2015, pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memperoleh email dari Rodrigo Mejia Ricart sebagai Junior Consultant Reform of Public Sektor Division Public Governance and Territorial Development Directorate OECD tentang kuesioner praktik-praktik pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro.

² Kabupaten Bojonegoro bersama Kota Seoul (Korea Selatan), Kota Tbilisi (Georgia), dan Kota Madrid (Spanyol) adalah beberapa percontohan pemerintah daerah pertama bersanding dengan 12 kota besar di dunia dari 45 kota yang mendaftar pada ajang ini.

Terpilihnya Bojonegoro sebagai pemerintahan daerah terbuka percontohan dunia, menjadikan Bojonegoro diundang di berbagai forum tingkat internasional, antara lain sebagai berikut; a) Open Governance Partnership Asia Pasific Regional Dialogue, tanggal 21-22 Juli 2016 di Manila, b) Subnational Pioneers' tier Meeting, tanggal 15-16 September 2016 di Washington DC, c) Institute of Development Studies (IDS) University of Sussex, Brighton-UK tanggal 5 Desember 2016, dan d) Open Governance Partnership Global Summit di Paris.

Realitas di atas menunjukkan bahwa gagasan paradigmatik manajemen pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan sesuai dengan bangunan global dalam rangka demokrasi secara luas dan perkembangan kesejahteraan yang inklusif. Riset ini akan mendedah proyek OGP di Kabupaten Bojonegoro dalam lan-skap keilmuan administrasi publik dan manajemen politik local yaitu analisa proyek OGP di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan analisa New Public Service (NPS).

Terdapat beberapa praktik penerapan manajemen pemerintahan OGP yang dapat ditelaah secara mendalam menggunakan kajian NPS. Dialog publik "Sobo Pendopo" yang diselenggarakan setiap Jumat siang di Pendopo Malowopati, layanan pengaduan publik melalui jejaring telekomunikasi dan sosial media, transparansi data dan informasi secara sistematis dan holistik serta mode pemerintahan blusukan serta membangun je-jaring multi-aktor dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Praktik tersebut menjadi sebuah instrumen sekaligus tujuan pemerintahan yang terbuka sehingga terpilih untuk menjadi contoh keberlanjutan praktik-praktik keterbukaan pemerintahan bagi daerah-daerah yang lain.

II. METODE PENELITIAN

Riset ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tipe grounded theory. Secara umum, perspektif ini adalah riset kualitatif yang menggunakan satu kumpulan prosedur sistematis untuk mengembangkan grounded theory induktif yang diturunkan tentang sebuah fenomena. Tujuan utama dari grounded theory adalah untuk memperluas penjelasan tentang fenomena dengan mengidentifikasi elemen kunci dari fenomena itu, dan kemudian mengkategorikan hubungan dari elemen-elemen dengan konteks dan proses percobaan. Penelitian ini menggunakan New Public Service sebagai pisau analisa Grounded Theory pada praktik OGP di Kabupaten Bojonegoro.

III. Hasil Penelitian

III.1. Dialog Publik

Dialog publik yang menjadi agenda pelopor keterbukaan pemerintah dalam menerima saran, kritik dan dukungan dari warga secara langsung. Gagasan yang meng-gusung nilai-nilai deliberasi ini

terselenggara secara kontinyu setiap Jumat siang di salah satu tempat "sakral" yaitu pendopo Malowopati. Dialog publik yang pertama kali di gelar hari Jumat, 14 Maret 2008 di Pendopo Malowopati menjadi pintu manajemen keterbukaan pemerintahan setelah Kang Yoto dan Setyo Hartono di lantik. Mekanisme komunikasi deliberasi antar pemerintahan dan warga menjadi medium praktis dalam memecahkan setiap persoalan publik sekaligus mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Pemilihan lokasi dialog publik di kawasan kantor pemerintahan Kabupaten Bo-jonegoro yaitu Pendopo Malowopati untuk ruang publik yang demokratis, bebas dan terbuka umum menjadi kanal desakralisasi objek pemerintahan. Persoalan ketidakpercayaan (distrust) warga terhadap pemerintah yang tinggi secara perlahan dapat terselesaikan dengan manajemen keterbukaan pemerintah.

Di dalam perjalanannya sampai saat ini, dialog publik berjalan secara konsisten dengan melibatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagai pelaksana kebijakan sekaligus aktor-aktor diluar pemerintahan seperti swasta, kelompok ahli atau akademisi dan kalangan luas lainnya secara terbuka. Peneliti sempat mengamati dan merasakan atmosfer dialog publik di hari Jumat, 24 Maret 2017. Ketika itu, Kang Yoto duduk di salah satu meja yang terletak di samping panggung utama dan para birokrat yang terkait (SKPD) bertempat di meja utama sebagai moderator sekaligus pengisi acara. Tanya ja-wab berlangsung cair dan bebas.

Desakralisasi pendopo menjadi kebijakan politik deliberasi yang mengawali reformasi manajemen pemerintahan Kang Yoto. Membangun pemerintahan yang terbuka dalam konteks politik ruang maupun komunikasi politik dalam rangka mengikis persoalan disparitas kepercayaan warga terhadap birokrasi pemerintahan hingga membangun kepercayaan dan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Dialog interaktif di Pendapa Malowopati Bojonegoro juga secara langsung me-lalui Radio Malowopati 95,8 FM dan Radio Madani 102,5 FM, serta streaming di ap-likasi Youtube. Sehingga secara luas warga Bojonegoro dapat menyaksikan dialog ini.

III.1.2. Layanan Pengaduan Warga: SMS dan Radio Malowopati

Keterbatasan waktu dan luas antar jarak wilayah di Kabupaten Bojonegoro tidak menutup ruang komunikasi dan partisipasi warga terhadap pemerintahan terkait persoa-lan-persoalan yang ada. Layanan pesan pendek melalui piranti handphone menjadi al-ternatif kritik dan saran warga melalui radio Malowopati 98,5 FM

Aduan warga itu dapat disampaikan dalam program "Cakrawala Pagi" Radio Malowopati FM Bojonegoro mulai pukul 06.00 WIB sampai pukul

08.00 WIB. Kemudian, aduan warga juga bisa disampaikan di program selanjutnya yang disebut “Ayo Masbro” mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 09.30 WIB. Warga bisa mengi-rimkan SMS melalui nomor 0821143212958. Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Radio Malowopati, Alit Saksama Purnayoga, warga banyak yang menyampaikan keluhan dan aduan terkait pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, in-frastruktur di program Cakrawala Pagi dan Ayo Masbro tersebut.

Secara prosedural semua aduan atau keluhan warga langsung ditanggapi oleh penyiar radio bersama dengan narasumber dari SKPD Kabupaten Bojonegoro. Secara teknis, SMS aduan itu juga diteruskan ke aplikasi SIAP LAPOR! yang dikelola oleh Di-nas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Kemudian, apabila keluhan itu tak ditanggapi maka akan ditindaklanjuti dalam rapat management review di Rumah Dinas Bupati Bojonegoro di setiap hari Jumat pagi mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.30.



Gambar 1. Alur Sinkronisasi Laporan Warga dan Evaluasi SKPD

III.3. Interpretasi Paradigma New Public Service dalam Pemerintahan Terbuka Kabupaten Bojonegoro

III.3.1. Demokrasi Kewargaan

Peran serta warga dalam kehidupan politik menjadi inti dari demokrasi. Keterlibatan warga dalam mengagregasi kepentingan politik dalam sebuah sistem politik yang formal maupun upaya-upaya deliberasi informal berkorelasi dengan derajat demokrasi kewargaan. Untuk menunjang proposisi tersebut diperlukan setidaknya dua komponen dasar yaitu kompetensi warga dan sistem politik demokratis yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Peran dan tanggung jawab yang ideal warga dan negara dapat dilacak melalui literasi filsafat Yunani klasik. Salah satu teoritis politik J.G.A. Pocock menyatakan bahwa sejarah konsep kewarganegaraan dalam pemikiran politik Barat

adalah sebuah dialektika yang belum usai antara ide dan realitas.³ Aristoteles dalam karya besarnya, *Politics*, melihat warga negara yang terlibat dalam praktik-praktik polis (politik negara-kota) sebagai bentuk pencapaian eksistensi sebuah dasar kemanusiaan yang hakiki (*zoon politicon*).

Dikotomi dengan paradigma sebelumnya, asumsi demokrasi kewargaan dalam konteks New Public Service adalah pada kepentingan publik yang lebih dominan dibanding kepentingan diri. Menurut Sandel, semangat politik altruisme warga dalam melihat kepentingan publik lebih besar melampaui kepentingan diri, menganut perspektif lebih luas dan lebih memiliki jangka panjang dengan rasa saling memiliki dan ikatan moral dalam sebuah komunitas kewargaan yang nasibnya dipertaruhkan.⁴

Jean Jacques Rousseau, filsuf era renaissance berkebangsaan Prancis, mengikuti tradisi pemikiran Aristotelian, pada dasarnya mendefinisikan warga negara sebagai orang yang bertindak sambil memperhatikan kebaikan komunitas. Kewarganegaraan adalah suatu cara hidup yang melibatkan komitmen kepada komunitas dan para anggotanya dimana menjadi suatu level keterlibatan yang signifikan dalam urusan-urusan publik, dan suatu kehendak untuk meletakkan kepentingan seseorang di bawah kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tocqueville menyebutnya sebagai kepentingan diri yang dimengerti dengan tepat.⁵

Meski secara dominan kehadiran warga dalam sistem politik guna mengagregasi semangat politik altruisme (*public spirit*), hal tidak serta merta menggugurkan kepentingan diri. Justru konflik kepentingan diri antar warga menjadi perjumpaan awal keterlibatan warga dalam membangun dan merumuskan persoalan publik. Prinsip-prinsip deliberasi yang disertai asas-asas keadilan, ruang partisipasi yang simetris dan pertimbangan mendalam antar warga yang saling bertentangan kepentingan diharapkan dapat menuju sebuah konsensus.⁶

Sejak periode pertama pemerintahannya di tahun 2008, Bupati Bojonegoro Suy-oto dan Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, memahami benar bahwa membangun dialog publik Sobo Pendopo adalah langkah demokratis yang solutif di tengah demo-kraasi yang mengedepankan semangat publik memang telah lama hanya menjadi pemanis kelompok elit di konstelasi politik nasional.

III.3.2. Model Komunitas dan Warga Sipil

Tujuan dari partisipasi warga adalah penciptaan kolektivitas warga yang ter-sistematis sehingga

³ Dialektika warga negara lebih memperhatikan “tujuan-tujuan” yang hendak di capai dalam kehidupan sosial, mereka kurang memperhatikan “alat-alat” industri atau produksi. Kewarganegaraan tidak dilihat sebagai kegiatan instrumental (alat bagi suatu tujuan) karena menjadi warga negara yang aktif adalah tujuan itu sendiri. Kebebasan bernilai bila diperoleh dengan berpartisipasi dalam praktik politik. J.G.A. Pocock. 1995. “The Idea of Citizenship Since Classic Times,” dalam *Theorizing Citizenship*, ed. Ronald Beiner, 29-52, Albany: State University of New York Press.

⁴ Michael Sandel. 1996. *Democracy’s Discontent*, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

⁵ Alexis de Tocqueville. 1969. *Democracy in America*. Terj. George Lawrence, ed. J.P. Mayer. Garden City, New York: Doubleday.

⁶ Semangat publik (Altruisme) dijelaskan oleh Mansbridge bisa saja melahirkan kamufase politik melalui indoktrinasi dan karisma elit politik, maka perlu di pupuk dan dipelihara melalui perhatian yang ajeg kepada prinsip-prinsip keadilan, partisipasi dan pertimbangan-pertimbangan publik yang mendalam.

aspirasi dan dialog publik menjadi lebih kontekstual dan efektif. Barber menyebutkan bahwa mempersatukan kewarganegaraan daripada kepentingan homogen lebih relevan mencapai maksud dan tujuan bersama. Dia melihat warga diubah dari sekedar mempunyai kepentingan-kepentingan pribadi menjadi sebuah kepentingan kolektif yang dikelola secara matang.⁷

Keberadaan komunitas sebagai penjelmaan masyarakat modern yang mampu mengregasi kepentingan komunal dalam konstelasi sistem politik akhir-akhir ini begitu tinggi. Korelasi ini pada aspek demokratisasi yang mendukung perserikatan sipil untuk menyatakan kritik maupun dukungan secara langsung kepada pemerintah. Konteks politik di Indonesia, munculnya NGO baik itu berasal dari jejaring komunitas global maupun yang berasal dari masyarakat (bottom up) memberi warna demokrasi yang kian beragam. Di Kabupaten Bojonegoro, komunitas sipil menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan daerah. Salah satu temuan peneliti adalah ketika menghadiri rapat membahas rencana aksi OGP, terlihat perwakilan dari Bojonegoro Institut (BI) dan ID-FoS yang duduk di podium utama bersama pejabat Dinas Komunikasi dan Informasi.

Setidaknya dua faktor penting bagaimana komunitas sipil mampu terlibat dalam persoalan-persoalan politik secara nyata. Pertama, menyangkut kesadaran publik yang meleburkan persoalan diri ke dalam persoalan bersama untuk sebuah tujuan umum, maka membangun sebuah kesatuan adalah keniscayaan politik dalam menjangkau sistem politik. Kedua, peran pemimpin politik dan pemerintahan dalam mendorong pembangunan komunitas dan masyarakat sipil. Para pemimpin politik berusaha menjangkau warga dengan cara-cara yang substansial, baik melalui teknologi informasi modern maupun mekanisme konvensional seperti dialog publik dan peraturan yang menyangkut kebebasan berserikat.⁸

Kang Yoto menyadari bahwa pembangunan daerah tak bisa lepas dari keterlibatan aktif warga dan komunitas sipil. Selain untuk memastikan persoalan di tengah-tengah masyarakat, kehadiran mereka mempermudah kinerja pemerintahan sehingga meningkatkan derajat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Faktor-faktor yang mendukung sinergisitas tersebut menyangkut, pertama, jaringan interaksi warga yang kuat dan tingkat kepercayaan sosial yang tinggi dan kohesi di kalangan warga. Pemerintah dapat melihat ini sebagai modal sosial yang telah terbentuk untuk membangun jaringan-jaringan yang lebih kuat lagi sehingga membuka jalan dialog maupun perdebatan yang berkenaan dengan masalah-masalah dengan langkah yang demokratis.

Kedua, para administrator publik (birokrasi SKPD) turut berkontribusi bagi pembangunan komunitas.⁹

III.3.3. Humanisme Organisasional

Basis teori ketiga dalam paradigma New Public Service adalah humanisme organisasional. Keterbukaan pemerintahan terhadap tiga komponen penting yaitu data dan informasi, aksesibilitas warga dan pengaduan secara langsung maupun tidak berimplikasi pada pergeseran sistem organisasi pemerintahan di Kabupaten Bojonegoro. Konteks ini, peneliti di dalam mencari data kualitatif, turut merasakan perubahan dari sistem organisasi yang prosedural dan rigid di dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti di Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah serta Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi lebih komunikatif dan responsif.

Dehardt dalam bukunya *In The Shadow of Organization*, menuliskan bahwa terciptanya pengaturan yang memungkinkan terjadinya dialog dan kreativitas, mutualitas dan penghargaan yang menyumbang bagi pertumbuhan maupun perkembangan individu dan juga memungkinkan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi menangani kompleksitas lingkungan dengan lebih efektif dan bertanggung jawab adalah suatu usaha yang dimulai dengan tindakan-tindakan para individu.¹⁰

Di dalam konteks pelayanan publik, birokrasi pemerintahan harus mendukung keadilan dan kesejahteraan warga. Hal ini diperkuat dalam buku *New Public Administration* karya George Fredrickson, bahwa pemerintahan harus menyediakan pelayanan yang bermartabat dan berorientasi pada persoalan warga yang mendasar.¹¹ Dialog publik dan mekanisme pengaduan warga yang begitu ragam di Kabupaten Bojonegoro bisa menjadi model pelayanan publik yang berusaha menuntaskan persoalan mendasar yaitu membangun tingkat kepercayaan publik.

III.3.4. Administrasi Publik Postmodern

Keragaman wacana dan persoalan publik menuntut pergeseran paradigma pemerintahan. Perubahan dari sifat top down menjadi bottom up, pendekatan persoalan yang normatif dan postivistik menjadi substantif dan interpretatif, kebijakan yang sarat simbolistik menjadi kebijakan yang riil, dan penggalian data dan informasi yang memiliki nilai daripada sekedar fakta semata.

Realitas sosial dan politik tidak hanya diterjemahkan ke dalam kalkulasi hitam dan putih ataupun angka-angka statistik semata. Namun perlu

⁷ Benjamin Barber. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkeley: University of California Press.

⁸ John Clayton Thomas. 1995. *Public Participation in Public Decisions*. San Francisco: Jossey-Bass.

⁹ John Nalbandian. 1999. *Facilitating Community, Enabling Democracy: New Roles of Local Government Managers*. *Public Administration Review* 59 (3): 187-98.

¹⁰ Roberth B. Denhardt. 1981. *In the Shadow of Organization*. Lawrence: Regents Press of Kansas.

¹¹ H. George Frederickson. 1980. *New Public Administration*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

untuk terjun secara nyata di lapangan untuk mendalami makna dan persoalan substansial di balik kalkulasi-kalkulasi kuantitatif tersebut. Pemerintahan tidak hanya duduk di ruang yang nyaman dibalik gedung perkantoran yang megah dengan simbolisasi seragam kehormatan sebagai aparaturnegeri sipil, namun membicarakan persoalan publik di dalam satu ruang yang sama dengan warga secara dialogis dan deliberasi sehingga muncul sebuah dialektika persoalan. Inilah esensi pergeseran model pemerintahan postmodern. Secara sederhana, tidak ada interpretasi tunggal terhadap sebuah persoalan, dibutuhkan mediasi dialogis untuk menemukan keragaman sudut pandang.

Dialog publik Sobo Pendopo menjadi instrumen pemerintahan postmodern. Tidak ada prosedural yang terlalu ketat, tidak ada penafsiran tunggal dan monopoli wacana, maka yang tersaji adalah dinamika isu yang memiliki kadar subyektifitas setiap warga yang hadir. Kanalisasi tersebut diperkuat dengan layanan pengaduan dua arah, dimana subyektifitas informasi bisa berasal dari pemerintah maupun warga.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini mengangkat isu manajemen pemerintahan yang berbasis OGP di Kabupaten Bojonegoro melalui metodologi Kualitatif-Grounded Theory. Konsep OGP menjadi isu kontemporer global paska keberhasilan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro selama 8 tahun menerapkan keterbukaan dan partisipasi publik di dalam kebijakan-kebijakan strategis sehingga menjadi Pilot Project OGP di Indonesia. Kebijakan tersebut adalah keterbukaan data melalui transparansi data dan informasi, keterbukaan akses melalui dialog publik, dan layanan pengaduan. Praktik-praktik tersebut diterjemahkan secara teoritisasi yang mendalam melalui paradigma New Public Service yaitu manajemen pemerintahan yang berbasis pada 4 episentrum teori yaitu demokrasi kewargaan, model komunitas dan masyarakat sipil, humanism organisasi dan administrasi publik postmodern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Panduan Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. pdf.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro dalam Angka 2016. Pdf.
- Barber, Benjamin. 1984. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Berkeley: University of California Press.
- _____. 2013. *If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities*. New York: Yale University Press.
- Boyte, Harry C., dan Nancy N. Kari. 1996. *Building America*, Philadelphia: Temple University Press.

- Bungin, Burhan. 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Creswell, John. W., 1994, *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Approaches*, Sage Publication.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro. 2016. *Menuju Gerbang Dunia; Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia*. Pdf.
- Denhardt, Robert B., 1981. *In the Shadow of Organization*. Lawrence: Regents Press of Kansas.
- Demmers, J., Jilberto, A. E. F. & Hogenboom, B. 2004, 'Good Governance and Democracy in a World of Neoliberal Regimes', in *Good Governance in the Era of Global Neoliberalism*, eds J. Demmers, A. E. F. Jilberto & B. Hogenboom, Routledge, London & New York.
- Dennis Thompson. 1970. *The Democratic Citizen*, Cambridge: Cambridge University Press.
- De Tocqueville, Alexis. 1969. *Democracy in America*. Terj. George Lawrence, ed. J.P. Mayer. Garden City, New York: Doubleday.
- Evan, Sarra M., dan Harry C. Boyte. 1986. *Free Spaces*, New York: Harper and Row
- Frederickson, H. George. 1980. *New Public Administration*. Tuscaloosa: University of Alabama Press.
- Gray, Joseph dan Linda Chapin. 1998. *Targeted Community Initiative*, "dalam *Government Is Us*, ed. Cheryl S. dan Camila Stivers, 175-94, Thousand Oaks, CA: Sage.
- Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, 2003. *The New Public Service: Serving, not Steering*, New York: M.E Sharpe, Armonk
- Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Daerah tahun 2016.pdf.
- Lapped, Francis Moore dan Paul Martin Du Bois. 1994. *The Quickening of America: Rebuilding Our Nation, remaking Our Lives*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Maatweg, Miles. B., & Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Marsh, David dan Gerry Stoker, 2002. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Jakarta : Nusa Media.
- Miftah, Thoha. 2009. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Mill, John Stuart. 1862. *Considerations on Representative Government*, New York: Harper, II,2.
- Najem, T. P. 2003, 'Good Governance: The Definition and Application', in *Good Governance in the Middle East Oil Monarchies* eds T. P. Najem & M. Hetherington, Routledge Curzon. London & New York.
- Nicholas, Henry. 1995. *Public Administration and Public Affairs* (Sixth Edition). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 2003. *Reinventing Government* (Mewirusahaakan Birokrasi):

- Sepuluh Prinsip untuk Mewujudkan Pemerintahan Wirausaha. Jakarta: PPM.
- Owen E. Hughes, 1998, *Public Management and Administration: An Introduction* (Second Edition), New York: St. Martin Press, New York.
- Pocock, J.G.A., 1995. "The Idea of Citizenship Since Classic Times," dalam *Theorizing Citizenship*, ed. Beiner, Ronald. 29-52, Albany: State University of New York Press.
- Putnam, Robert. 2000. *Bowling Alone*. New York: Simon and Schuster.
- Sandel, Michael. 1996. *Democracy's Discontent*, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Yeremias T. Keban, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Pertama), Yogyakarta: Gava Media.
- Jurnal
- Dimock, Marshall E., dan Gladys O. Dimock. 1969. *Public Administration* edisi ke 4. Hinsdale, IL: Dryden Press.
- Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, 2000. "The New Public Service: Service Rather than Steering", *Public Administration Review* 60 (6).
- Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, 2003. "The New Public Service: An Approach to Reform", *International Review of Public Administration* 8 (1).
- Leftwich, Adrian. 1993, 'Governance, Democracy and Development in the Third World', *Third World Quarterly*, vol. 14, no. 3, pp. 605-624.
- Available from: <http://www.jstor.org/stable/3992489>
- Nalbandian, John. 1999. *Facilitating Community, Enabling Democracy: New Roles of Local Government Managers*. *Public Administration Review* 59 (3): 187-98.
- Waldo, Dwight. 1952. *The Development of A Democratic Administration*. *American Political Science Review* 46 (Maret):81-103.
- Internet
- <http://ppid-kominfo.bojonegorokab.go.id/>.
- <http://opengovindonesia.org/>
- <https://www.lapor.go.id/>.
- http://ppidkominfo.bojonegorokab.go.id/?page_id=25.
- <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/359/Dekatkan-Pelayanan-Kepada-Warga>.
- <http://ppid-dinkominfo.bojonegorokab.go.id/berita/ppid-bi-gelar-diskusi-evaluasi-pelayanan-infor>
- masi-publik